

BAB I

PENDAHULUAN

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merupakan prasyarat utama dalam tata kelola publik yang baik. Pada level institusional, kepercayaan ini mempermudah jalannya fungsi pemerintahan karena masyarakat yang percaya cenderung lebih patuh terhadap kebijakan, lebih kooperatif dalam program publik, dan lebih responsif terhadap arahan negara dalam situasi krisis (Christensen & Lægreid, 2005). Sementara itu, perilaku pemerintah secara timbal balik juga memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat. Kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas secara efisien dan bersih, melaksanakan kebijakan secara efektif, serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi merupakan faktor-faktor penentu kepercayaan publik (Zhang dkk., 2022). Penilaian masyarakat terhadap kinerja tersebut dapat dipahami melalui tiga dimensi utama kepercayaan: persepsi atas kompetensi, niat baik, dan integritas (Grimmelikhuijsen & Knies, 2017).

Kepercayaan terhadap pemerintah tidak terbentuk dari satu faktor tunggal. Christensen & Lægreid (2005) mengidentifikasi setidaknya tiga dimensi yang saling berkaitan: kualitas layanan publik, orientasi politik-budaya masyarakat, dan latar belakang demografis individu. Di antara ketiganya, kualitas layanan menjadi yang paling langsung dirasakan oleh warga. Masyarakat menilai seberapa efisien dan transparan pemerintah bekerja, serta seberapa konsisten kebijakan diterapkan di lapangan (Zhang dkk., 2022). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama membentuk cara masyarakat mengevaluasi kinerja pemerintah.

Penanganan bencana menjadi salah satu konteks paling nyata untuk menguji kepercayaan masyarakat, terutama di negara dengan tingkat kerawanan bencana setinggi Indonesia. Respons pemerintah dalam situasi ini berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa, pemenuhan kebutuhan dasar, dan kecepatan pemulihan pasca bencana. Letak geografis di kawasan Cincin Api Pasifik menyebabkan tingginya potensi gempa bumi dan erupsi gunung berapi, sementara kondisi iklim tropis meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan cuaca

ekstrem. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (2026) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 telah terjadi ribuan peristiwa bencana, termasuk 2.009 kejadian banjir, 1.329 kebakaran hutan dan lahan, 28 gempa bumi, serta beberapa kejadian tsunami dan erupsi gunung berapi.

Survei Kompas (2025) mengungkapkan bahwa 56,4% responden menilai komitmen pemerintah dalam penanganan bencana sudah kuat atau sangat kuat, sementara 41,6% lainnya menilai masih lemah. Proporsi penilaian negatif yang cukup besar ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap penanganan bencana masih terbagi, dan cara masyarakat memaknai respons pemerintah menjadi faktor yang menentukan. Salah satu mekanisme psikologis yang menjelaskan perbedaan pemaknaan ini adalah proses *blame*. Malle dkk. (2022) melalui *path model of blame* menjelaskan bahwa *blame* terbentuk melalui serangkaian penilaian kognitif yang berurutan: apakah terjadi pelanggaran norma, apakah agen terlibat secara kausal, apakah keterlibatan tersebut bersifat intensional, dan apakah dampak buruk itu seharusnya dapat dicegah. Dalam konteks bencana, ketika masyarakat menilai bahwa kerugian yang terjadi seharusnya dapat dihindari melalui tindakan pemerintah yang lebih sigap, *blame* akan meningkat. Agung & Maulana (2021) mengonfirmasi mekanisme ini secara empiris dalam kasus bencana kabut asap di Pekanbaru, di mana penyalahan terhadap pemerintah terbukti menjadi mediator yang secara signifikan menurunkan tingkat kepercayaan publik.

Dalam situasi bencana yang ambigu, individu kerap merujuk pada informasi publik seperti pemberitaan media dan hasil survei untuk menilai kinerja pemerintah (Saifullizam dkk., 2025). Kepercayaan dengan demikian tidak selalu terbentuk melalui evaluasi langsung, melainkan juga melalui persepsi yang berkembang di lingkungan sosial. Publikasi hasil survei khususnya dapat memengaruhi persepsi individu mengenai kecenderungan opini sosial yang sedang berkembang (Haidar, 2024), sehingga penilaian mayoritas terhadap pemerintah berpotensi berfungsi sebagai petunjuk sosial yang membentuk sikap pribadi. Mekanisme inilah yang mengindikasikan bahwa konformitas turut berperan dalam membentuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yang secara teoretis dapat dijelaskan melalui *informational social influence*.

Deutsch & Gerard (1955) mendefinisikan *informational social influence* sebagai kecenderungan individu untuk menerima informasi dari orang lain sebagai bukti mengenai realitas (*evidence about reality*). Berbeda dengan pengaruh normatif yang didorong oleh keinginan untuk diterima secara sosial, pengaruh informasional berakar pada kebutuhan kognitif individu untuk merasa akurat di tengah ambiguitas. Dalam konteks evaluasi kinerja pemerintah yang kompleks, terlebih dalam situasi bencana, individu yang mengalami ketidakpastian kognitif cenderung menjadikan suara mayoritas sebagai sumber informasi yang dianggap lebih valid, bukan sekadar tekanan sosial semata (Deutsch & Gerard, 1955).

Sejumlah studi empiris mengonfirmasi bahwa mekanisme ini secara nyata mengubah keyakinan subjektif individu. Koriati dkk. (2018) melalui konsep *Prototypical Majority Effect* (PME) menemukan bahwa individu merasa jauh lebih yakin atas penilaiannya ketika mengetahui bahwa penilaian tersebut sejalan dengan kelompok. Dukungan sosial dalam hal ini berfungsi sebagai validasi eksternal yang mengeliminasi keraguan, sebuah proses yang sepenuhnya bersifat kognitif dan bukan sekadar keinginan untuk *conform* secara normatif. Hasibuan dkk. (2025) dalam studinya mengenai Pemilihan Presiden Indonesia 2024 pada pemilih milenial juga menemukan bahwa *bandwagon effect* berpengaruh signifikan sebesar 56,1% terhadap keputusan individu, yang menunjukkan bahwa opini mayoritas di ruang publik mampu mendorong individu untuk menginternalisasi pilihan tersebut sebagai yang paling valid. Secara bersama-sama, temuan ini mengindikasikan bahwa kepercayaan tidak selalu terbentuk dari evaluasi mandiri yang mendalam, melainkan dapat dibentuk melalui proses internalisasi opini kolektif yang bersifat informasional.

Campbell (2023) melalui eksperimen *vignette* menemukan bahwa kinerja kebijakan dan partisipasi publik merupakan faktor paling krusial dalam membentuk kepercayaan kepada pemerintah, namun belum mempertimbangkan konformitas sebagai variabel yang turut berperan. Di sisi lain, Koriati dkk. (2018) telah membuktikan secara eksperimental bahwa paparan opini mayoritas meningkatkan keyakinan individu, namun pengujiannya terbatas pada sikap dan keyakinan umum, bukan pada kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Studi noneksperimental

hanya mampu menghasilkan kesimpulan pada level deskripsi dan prediksi, sehingga tidak dapat memastikan arah hubungan sebab-akibat antara konformitas dan kepercayaan; apakah konformitas yang mendorong kepercayaan, atau justru sebaliknya kepercayaan yang membuat individu lebih rentan terhadap pengaruh mayoritas (Yusainy, 2019). Desain eksperimental memungkinkan peneliti memanipulasi paparan informasi konformitas secara langsung sehingga kausalitas temporal antara konformitas dan kepercayaan dapat disimpulkan dengan lebih valid. Dalam situasi bencana yang ambigu, individu sangat mungkin menjadikan opini mayoritas sebagai dasar penilaian terhadap pemerintah, sehingga pengujian efek kausal konformitas menjadi semakin penting. Oleh karena itu, penelitian ini menguji peran konformitas dalam membentuk kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah dalam ranah penanggulangan bencana menggunakan desain eksperimen *vignette*.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Kesulitan masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah secara objektif di tengah situasi bencana yang serba tidak pasti, sehingga muncul keraguan dalam menentukan tingkat kepercayaan yang tepat.
2. Kuatnya kecenderungan masyarakat untuk melakukan konformitas dengan merujuk pada opini mayoritas atau tren publik sebagai patokan kebenaran guna mengatasi ketidakpastian informasi yang mereka hadapi.
3. Munculnya bias dalam pembentukan kepercayaan (*trust*) publik, di mana penilaian masyarakat terhadap pemerintah tidak lagi sepenuhnya murni berdasarkan kinerja nyata, melainkan mulai terpengaruh oleh tekanan sosial dan persepsi kolektif di lingkungan mereka.

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka peneliti membatasi masalah pada peran konformitas informasional dalam membentuk kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintah, khususnya dalam konteks situasi penanggulangan bencana yang memiliki tingkat ketidakpastian informasi yang tinggi.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka rumusan masalah adalah “Apakah konformitas berperan signifikan terhadap kepercayaan kepada pemerintah di Indonesia dalam penanggulangan bencana?”

1.5. Tujuan Penelitian

Untuk menguji secara eksperimental peran konformitas terhadap tingkat kepercayaan individu kepada pemerintah dalam konteks penanganan bencana di Indonesia.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan mampu memberikan manfaat yang terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Psikologi Sosial, khususnya terkait mekanisme konformitas informatif dalam pembentukan sikap politik dan kepercayaan kepada pemerintah pada situasi krisis.

1.6.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pemerintah, lembaga survei, dan media massa mengenai bagaimana informasi tentang opini mayoritas dapat memengaruhi pembentukan kepercayaan publik. Selain itu, penelitian ini memperluas penerapan teori konformitas dalam konteks kebijakan publik dan kebencanaan di Indonesia.

Hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam strategi komunikasi publik saat terjadi bencana, agar penyampaian informasi dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab sehingga tidak hanya membentuk persepsi kolektif, tetapi juga memperkuat legitimasi institusi pemerintah secara substantif.